

PENGARUH KOMUNIKASI BPBD TERHADAP KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI TSUNAMI DI PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI

Mutiara Syafitri¹⁾, Dahly Sukmapryandhika, Ar²⁾, Harky Ristala³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Wilayah pesisir Palabuhanratu, khususnya Desa Citepus dan Desa Jayanti, menghadapi ancaman tsunami yang tinggi akibat posisinya yang berhadapan langsung dengan zona megathrust Selat Sunda. Namun intensitas komunikasi kebencanaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat kedua desa tersebut masih tergolong rendah dalam sepuluh tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan mengukur pengaruh komunikasi pemerintah BPBD terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami di kedua desa tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden melalui teknik proportionate stratified random sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana berbantuan IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi pemerintah BPBD berada pada kategori sangat baik dengan skor rata-rata 4,48, sedangkan kesiapsiagaan masyarakat berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 4,12. Komunikasi pemerintah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapsiagaan masyarakat, dengan nilai t hitung 6,016 lebih besar dari t tabel 1,984 pada taraf signifikansi 0,000. Kontribusi pengaruhnya sebesar 27,0 persen, sedangkan 73,0 persen sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan konsistensi komunikasi BPBD serta penguatan kesiapan fisik individu masyarakat pesisir Palabuhanratu.

Kata Kunci: komunikasi pemerintah, kesiapsiagaan masyarakat, bencana tsunami, BPBD, wilayah pesisir

Abstract

The coastal area of Palabuhanratu, particularly Citepus and Jayanti Villages, faces a high tsunami threat due to its direct exposure to the Sunda Strait megathrust zone. However, the intensity of disaster communication carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Sukabumi Regency toward the communities of both villages has remained low over the past decade. This research aims to measure the influence of BPBD's government communication on community preparedness in facing tsunami disasters in both villages. The research applied an explanatory quantitative approach by distributing questionnaires to 100 respondents through proportionate stratified random sampling. Data were analyzed using simple linear regression

assisted by IBM SPSS Statistics version 25. The results show that BPBD's government communication falls into the very good category with an average score of 4.48, while community preparedness falls into the good category with an average score of 4.12. Government communication was proven to have a positive and significant effect on community preparedness, with a calculated t value of 6.016 greater than the t table value of 1.984 at a significance level of 0.000. The contribution of influence reached 27.0 percent, while the remaining 73.0 percent was influenced by other factors outside this study. This research recommends strengthening the consistency of BPBD communication along with individual physical preparedness among the coastal community of Palabuhanratu.

Keywords: *government communication, community preparedness, tsunami disaster, BPBD, coastal area*

PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan dapat memicu disfungsi sosial pada wilayah yang terdampak (Simon dkk., 2015). Posisi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia membuat negara ini rentan terhadap tsunami, terutama di wilayah pesisir selatan Jawa yang berhadapan langsung dengan zona megathrust Selat Sunda (Nainitania & Darmawan, 2022). Kabupaten Sukabumi, khususnya Kecamatan Palabuhanratu, termasuk kawasan berisiko tinggi karena segmen megathrust di wilayah tersebut tercatat memiliki periode ulang gempa besar tanpa pelepasan energi selama hampir tiga abad, sehingga potensi tsunami dengan gelombang lebih dari 20 meter tetap menjadi ancaman nyata bagi masyarakat pesisir (Ramdhani, 2024).

Menghadapi ancaman tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi berperan penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana (DESTANA), yang telah ditetapkan di Desa Citepus dan Desa Jayanti sebagai dua desa pesisir dengan tingkat kerentanan tsunami yang tinggi. Sayangnya, data kegiatan penyuluhan dan simulasi kebencanaan di kedua desa tersebut selama periode 2014 hingga 2025 hanya tercatat sebanyak tujuh kali, bahkan tidak ada satu kegiatan pun yang tercatat sepanjang tahun 2020 sampai 2023. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana intensitas dan kualitas komunikasi pemerintah yang dijalankan BPBD berpengaruh terhadap kesiapsiagaan masyarakat, mengingat komunikasi pemerintah yang efektif terbukti mampu meningkatkan kesiapan warga dan

menekan risiko korban jiwa saat bencana terjadi (Frasetya dkk., 2021). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk mengukur seberapa besar pengaruh komunikasi pemerintah yang dijalankan BPBD Kabupaten Sukabumi terhadap kesiapsiagaan masyarakat Desa Citepus dan Desa Jayanti dalam menghadapi bencana tsunami. Penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan komunikasi pemerintah serta tingkat kesiapsiagaan masyarakat di kedua desa tersebut, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan bagi BPBD dalam menyusun strategi komunikasi kebencanaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif, yaitu metode yang berupaya mengungkap hubungan sebab akibat antarvariabel melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2023). Variabel independen dalam penelitian ini adalah komunikasi pemerintah BPBD Kabupaten Sukabumi, yang diukur melalui empat indikator berdasarkan konsep Terry dalam Hasan (2014), yaitu kelengkapan, kejelasan, kepadatan, dan kebenaran pesan. Variabel dependen adalah kesiapsiagaan masyarakat, yang diukur melalui tiga indikator dari konsep Lindell dan Perry sebagaimana dikutip dalam Anees (2022), meliputi analisis kerentanan, penilaian kemampuan sumber daya manusia, dan pengembangan rencana struktur organisasi.

Populasi penelitian adalah warga Desa Citepus dan Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, dengan jumlah 23.616 jiwa berdasarkan data kependudukan tahun 2025. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Taro Yamane dengan tingkat kesalahan 10 persen, sehingga diperoleh 100 responden yang kemudian dibagi secara proporsional melalui teknik proportionate stratified random sampling, yaitu 67 responden dari Desa Citepus dan 33 responden dari Desa Jayanti. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berskala Likert 1 sampai 5 yang disebarakan lewat Google

Form, dilengkapi observasi lapangan ke kantor BPBD serta kedua desa penelitian.

Sebelum pengujian hipotesis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pernyataan dinyatakan valid, kecuali satu item pada variabel kesiapsiagaan masyarakat yang kemudian dikeluarkan dari analisis karena nilai korelasinya tidak memenuhi syarat. Data selanjutnya diuji normalitas dan linearitas sebelum dianalisis menggunakan regresi linear sederhana berbantuan IBM SPSS Statistics versi 25, dilengkapi uji koefisien determinasi dan uji t untuk mengetahui besar dan signifikansi pengaruh antarvariabel.

PEMBAHASAN

Hasil rekapitulasi kuesioner menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah BPBD Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat Desa Citepus dan Desa Jayanti berada pada kategori sangat baik dengan skor rata-rata 4,48. Skor tertinggi diperoleh indikator kelengkapan pesan sebesar 4,71, diikuti kejelasan sebesar 4,63 dan kepadatan sebesar 4,44, sedangkan indikator kebenaran memperoleh skor terendah yaitu 4,14 meski tetap berkategori baik, sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Informasi tambahan yang diperoleh peneliti melalui komunikasi langsung dengan pihak BPBD menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebencanaan dilakukan lewat kombinasi kanal tatap muka, seperti sosialisasi dan simulasi, dengan kanal digital seperti grup WhatsApp dan akun Instagram resmi. Kombinasi kanal inilah yang membuat pesan yang disampaikan dinilai masyarakat cukup lengkap, jelas, dan padat, sekalipun konsistensi kebenaran informasi dari waktu ke waktu masih perlu diperkuat, sejalan dengan temuan Beong dkk. (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas BPBD dalam penanggulangan bencana sangat bergantung pada keteraturan penyampaian informasi kepada masyarakat.

**Tabel 1. Rekapitulasi Skor Komunikasi Pemerintah BPBD
Kabupaten Sukabumi**

No	Indikator	Skor Rata-rata	Keterangan
1	Kelengkapan	4,71	Sangat Baik
2	Kejelasan	4,63	Sangat Baik
3	Kepadatan	4,44	Sangat Baik
4	Kebenaran	4,14	Baik
	Total	4,48	Sangat Baik

Sumber: Pengolahan data peneliti, 2026.

Pada sisi lain, tingkat kesiapsiagaan masyarakat kedua desa berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 4,12. Indikator pengembangan rencana struktur organisasi memperoleh skor tertinggi sebesar 4,21 dan menjadi satu-satunya indikator berkategori sangat baik, menunjukkan bahwa rencana evakuasi dan keikutsertaan warga dalam simulasi sudah berjalan cukup baik. Indikator penilaian kemampuan sumber daya manusia berada pada skor 4,09, sedangkan indikator analisis kerentanan masyarakat terhadap bencana memperoleh skor terendah yaitu 4,07, seperti terlihat pada Tabel 2. Skor terendah pada indikator ini terutama tercermin dari masih rendahnya kepemilikan perlengkapan darurat oleh warga, sehingga kesadaran terhadap risiko tsunami belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan fisik individu, sebagaimana juga ditemukan Paramesti (2011) pada masyarakat kawasan Teluk Palabuhanratu yang cenderung memiliki pengetahuan dan sikap kebencanaan yang belum optimal.

**Tabel 2. Rekapitulasi Skor Kesiapsiagaan Masyarakat Desa
Citepus dan Desa Jayanti**

No	Indikator	Skor	Keterangan
1	Analisis Kerentanan Masyarakat terhadap Bencana	4,07	Baik

2	Penilaian Kemampuan SDM untuk Mengatasi Ancaman	4,09	Baik
3	Pengembangan Rencana Struktur Organisasi	4,21	Sangat Baik
	Total	4,12	Baik

Sumber: Pengolahan data peneliti, 2026.

Hasil analisis regresi linear sederhana memperlihatkan persamaan $Y = 27,246 + 0,415X$, yang berarti setiap peningkatan komunikasi pemerintah akan diikuti peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,270 menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah BPBD memberikan kontribusi pengaruh sebesar 27,0 persen terhadap kesiapsiagaan masyarakat, sedangkan 73,0 persen sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini, seperti pengalaman pribadi terhadap bencana sebelumnya atau tingkat pendidikan masyarakat. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,519 berada pada kategori sedang, menandakan hubungan yang cukup kuat namun belum dominan antara kedua variabel.

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,016 lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 pada taraf signifikansi 0,000, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, komunikasi pemerintah yang dijalankan BPBD Kabupaten Sukabumi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapsiagaan masyarakat Desa Citepus dan Desa Jayanti dalam menghadapi bencana tsunami. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Fauzi dan Rusdy (2020) yang menunjukkan bahwa pola komunikasi bencana yang konsisten mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat pesisir, sekaligus menegaskan bahwa peningkatan intensitas kegiatan penyuluhan oleh BPBD tetap menjadi kunci utama untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, mengingat rendahnya frekuensi kegiatan sosialisasi yang tercatat di kedua desa selama satu dekade terakhir.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi pemerintah yang dijalankan BPBD Kabupaten Sukabumi kepada masyarakat Desa Citepus dan Desa Jayanti sudah berjalan sangat baik, terutama pada aspek kelengkapan dan kejelasan pesan, sementara konsistensi kebenaran informasi dari waktu ke waktu masih menjadi titik yang perlu diperkuat. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat kedua desa secara umum tergolong baik, namun kesiapan fisik individu seperti kepemilikan perlengkapan darurat masih tertinggal dibandingkan aspek perencanaan struktur organisasi di tingkat desa. Komunikasi pemerintah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapsiagaan masyarakat dengan kontribusi pengaruh sebesar 27,0 persen, sehingga peningkatan intensitas dan konsistensi komunikasi kebencanaan oleh BPBD, disertai penguatan kesiapan fisik individu masyarakat, perlu terus didorong agar kesiapsiagaan warga pesisir Palabuhanratu terhadap ancaman tsunami semakin kokoh di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anees Muntaha, U. S. (2022). Assessing the preparedness and awareness regarding earthquakes among the residents of Srinagar City. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, 9(9). <https://www.jetir.org/papers/JETIR2209056.pdf>
- Beong, S., Resmawan, E., & Kalinggi, R. (2018). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 6(4), 1775–1788.
- Fauzi, N., & Rusdy, M. (2020). The pattern of disaster communication and media to improve community alertness in North Aceh Regency. *Journal Pekommas*, 5(2), 133. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050203>
- Frasetya, V., Corry W, A., Trenggono, N., & Putra, P. (2021). Komunikasi mitigasi bencana Kota Bandar Lampung. *Komunika*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.24042/komunika.v4i1.8624>

- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, E. (2014). Paradigma komunikasi pemerintahan. Refika Aditama.
- Nainitania, R., & Darmawan, D. (2022). Analisis zona genangan tsunami akibat gempa bumi megathrust di selatan Pulau Jawa. *Jurnal Envirotek*, 14(2), 20–26.
- Paramesti, C. A. (2011). Kesiapsiagaan masyarakat kawasan Teluk Pelabuhan Ratu terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. *Journal of Regional and City Planning*, 22(2), 113. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2011.22.2.3>
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Ramdhani, J. (2024, September). Gempa Sukabumi M 4,5 dipicu aktivitas sesar, getaran terasa hingga Banten. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7567966/gempa-sukabumi-m-4-5-dipicu-aktivitas-sesar-getaran-terasa-hingga-banten>
- Simon, T., Goldberg, A., & Adini, B. (2015). Socializing in emergencies: A review of the use of social media in emergency situations. *International Journal of Information Management*, 35(5), 609–619. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.001>
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif kualitatif (5th ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.